

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas kinerja keuangan terhadap masyarakat (Siregar : 2015). Oleh karena itu sistem pelaporan yang baik sangat dibutuhkan untuk menambah tingkat kepercayaan dan berguna bagi masyarakat serta pemakai laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan akan berguna apabila memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, serta dapat dibandingkan dan dipahami. Salah satu syarat agar informasi andal adalah laporan keuangan disajikan secara tepat waktu. Apabila laporan keuangan disajikan terlambat maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan kapasitas dalam pengambilan keputusan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan mengenai ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat 2 bulan setelah LKPD diterima oleh BPK (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Undang-Undang No. 15 tahun 2006 menuntut BPK untuk melakukan tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam hal ini masyarakat menuntut auditor BPK bekerja lebih baik agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik dan selesai tepat waktu. Salah satu yang diharapkan oleh pemakai laporan keuangan adalah agar tidak terjadi audit delay dalam melakukan pengauditan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Siregar : 2015)

Audit delay merupakan keterlambatan penyampaian LHP dari BPK terhadap DPR. Audit delay yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. BPK harus melaksanakan audit sedemikian rupa sehingga tidak terjadi audit *delay* sehingga LHP dapat diserahkan ke DPR secara tepat waktu. Kenyataannya adalah bahwa masih terjadi audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah. Terjadi audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah memotivasi kami untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah terhadap audit *delay*. Peneliti bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor karakteristik pemerintahan dan opini auditor berkontribusi terhadap terjadinya audit *delay* tersebut. Peneliti menguji faktor-faktor karakteristik pemerintahan daerah meliputi ukuran pemerintahan, nilai APBD, dan leverage.

Menurut Mardiasmo (2009:1), semenjak era reformasi di Indonesia bergulir, masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap kondisi dan kinerja entitas sektor publik. Selain itu dengan disahkannya peraturan mengenai otonomi daerah, Indonesia juga mengalami transisi dari pengelolaan keuangan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Hal tersebut membuat tuntutan masyarakat lebih tinggi agar pemerintah menerapkan *good governance* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sektor publik sehingga pengelolaan keuangan negara/daerah dilaksanakan dengan efisien, efektif dan ekonomis (*value for money*). Ketepatan waktu laporan keuangan merupakan salah satu ciri *good governance*.

Meskipun terdapat peraturan tentang keharusan ketepatan waktu laporan keuangan, hukuman terhadap para pelanggar pada prakteknya hampir tidak ada khususnya di Sumatera Selatan. Pada Tahun 2013 terdapat 4 Pemerintah Daerah yang mengalami audit delay. Tahun 2014 sampai 2016 selalu terdapat 1 Pemda yang mengalami audit delay disetiap tahunnya. Fakta-fakta tersebut membuktikan

bahwa belum seluruh pemda di Sumatera Selatan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1
Daftar Pemda yang mengalami audit delay di Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Tahun	Jumlah Pemda yang mengalami Audit Delay
1	2013	4 (Lahat, Ogan Ilir, Pagar Alam, Palembang)
2	2014	1 (Pagar Alam)
3	2015	1 (Musi Rawas)
4	2016	1 (Palembang)

Sumber: Laporan Keuangan BPK RI

Berdasarkan tabel 1.1 ada 4 Pemerintah Daerah yang mengalami audit delay pada tahun 2013 yaitu Lahat, Ogan Ilir, Pagar Alam dan Palembang. Pada tahun 2014 ada 1 Pemda yang mengalami audit *delay* yaitu Pagar Alam. Pada tahun 2015 ada 1 Pemda yang mengalami audit *delay* yaitu Musi Rawas Utara dan pada tahun 2016 yang mengalami audit *delay* cuma Palembang.

Siregar (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap audit *delay*. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintahan, nilai APBD dan *Leverage* terhadap audit *delay* laporan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ukuran pemerintahan dan tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap audit *delay* laporan keuangan. Nilai APBD tidak signifikan mempengaruhi audit *delay* laporan keuangan.

Hardini dan Sukirman (2016) melakukan penelitian mengenai analisis determinan audit *delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas kinerja, ukuran daerah dan opini auditor. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap audit *delay*, sedangkan ukuran daerah dan opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap audit *delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Ramadhanti (2017) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari penggunaan aplikasi SIKD, ukuran pemerintah, pengalaman kepala daerah, temuan auditor, hutang dan opini auditor. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel penggunaan aplikasi SIKD, ukuran pemerintah, temuan auditor dan opini auditor berpengaruh terhadap audit *delay*, sedangkan pengalaman kepala daerah dan hutang tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.

Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar daripada pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil akan melaporkan lebih cepat. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, sistem informasi yang lebih canggih, lebih banyak staf akuntansi, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik. Semakin besar aset pemerintahan maka semakin pendek audit *delay*. Penyebabnya adalah pertama, pemerintahan dengan aset besar mempunyai sistem pengendalian internal yang baik akan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. Lemahnya pengendalian internal klien memberikan dampak audit *delay* yang semakin lama karena auditor membutuhkan sejumlah waktu untuk mencari bukti yang lebih lengkap untuk mendukung opininya. Kedua, pemerintahan dengan aset besar mempunyai sumber daya keuangan untuk membayar audit *fee* yang lebih besar guna mendapatkan pelayanan audit yang lebih cepat. Ketiga, pemerintahan dengan aset besar cenderung mendapat tekanan dari pihak eksternal yang tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintahan, sehingga manajemen akan berusaha untuk mempublikasikan laporan audit dan laporan keuangan auditan lebih tepat waktu (Siregar : 2015:99).

Apabila dilihat dari sudut pandang lain ukuran pemerintah juga dapat berpengaruh positif terhadap audit *delay*. Hal ini didasarkan bahwa pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar biasanya menyusun laporan keuangan dan melaporkan hasil laporan auditnya lebih lama dibandingkan dengan pemerintahan

yang memiliki asset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki asset yang lebih besar memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak sehingga hal tersebut menyebabkan semakin lama proses pembuatan laporan keuangan dan proses auditnya (Payne dan Jensen : 2002:66).

Pemda yang memiliki APBD besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan pemda yang memiliki APBD lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu lebih lama dalam penyusunan laporan keuangan sehingga akan menyebabkan audit *delay* (Siregar : 2015:100). Nilai APBD dapat berpengaruh terhadap audit *delay* secara negatif. Hal tersebut di dasari pada asumsi bahwa semakin besar pendapatan yang di miliki oleh pemerintahan maka pemerintah mampu memiliki teknologi, fasilitas, serta sumber daya yang lebih baik sehingga mampu menyusun laporan keuangan lebih cepat sehingga BPK dapat lebih cepat dalam menyelesaikan proses auditnya. Artinya semakin besar total pendapatan yang dimiliki oleh pemerintahan akan mengurangi tingkat audit delay (Siregar : 2015:100).

Leverage merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor (Fahmi : 2013:127). Pengukuran tingkat leverage biasanya menggunakan *debt to total asset ratio*.

Debt to assets ratio mengindikasikan kesehatan dari keuangan pemerintah. Semakin tinggi *debt to assets ratio* maka semakin tinggi tingkat kegagalan pemerintah sehingga auditor akan meningkatkan perhatiannya karena ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit hutang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan dengan mengaudit modal.

Debt to assets ratio yang tinggi memberikan sinyal bahwa pemerintah sedang dalam kesulitan keuangan. Biasanya pemerintahan akan mengurangi resiko dengan memundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan

keuangan pemerintahan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan audit *delay*.

Leverage juga dapat berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Apabila tingkat *leverage* semakin tinggi maka tingkat audit *delay* semakin rendah. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya (Siregar : 2015:100).

Opini Auditor merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil atau laporan keuangan tahunan pada akhir tahun, pendapat ini dapat menjadi sebuah penilaian akan kesuksesan suatu kinerja baik keuangan/non-keuangan pemerintahan daerah. Terdapat 5 macam opini audit yang dikeluarkan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat (Agoes : 2012:30). Opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar ataupun tidak memberikan pendapat dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Opini auditor merupakan indikator baik buruknya laporan keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik opini auditor maka semakin baik pula laporan keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik opini auditor maka semakin kecil pula tingkat audit *delay* (Hardini dan Sukirman 2016:4).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik pemerintahan dan opini auditor terhadap audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Pengaruh Karakteristik Pemerintahan dan Opini Auditor terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.***

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran pemerintah terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh nilai APBD terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah terdapat pengaruh opini auditor terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah terdapat pengaruh ukuran pemerintah, nilai APBD, leverage dan opini audit terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Ukuran Pemerintah, Nilai APBD, Leverage dan Opini Audit Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun anggaran 2013 - 2016.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji:

1. Pengaruh ukuran pemerintah terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengaruh nilai APBD terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Leverage terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh opini auditor terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
5. Pengaruh ukuran pemerintah, nilai APBD, leverage dan opini audit terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Faktor-faktor penyebab Audit Delay di Sumatera Selatan yang ditinjau melalui Ukuran Pemerintahan, Nilai APBD, *Lverage* dan Opini Audit. Hal ini dilakukan dalam evaluasi terhadap penyebab Audit Delay dalam upaya meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Sumatera Selatan terutama dalam hal ketepatan waktu dalam pelaporan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap audit delay di Provinsi Sumatera Selatan.